NAMA : 15 IR. LA BAGE, ST\_DPUTR KONAWE KEPULAUAN

NO. ABSEN : 15

## TANGGAP DARURAT BENCANA

#### A. DASAR HUKUM DAN KELEMBAGAAN

- UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa BNPB bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana alam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2024
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 233/KPTS/M/2008 tentang Petunjuk Teknis dalam Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pada Tahap Bencana di Lingkungan Kementerian PU.
- Keputusan Menteri PUPR Nomor: 1176/KPTS/M/2019 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Kementerian PUPR.
- Nota Kesepahaman (MOU) NO.02/PKS/M/2013, NO.85/BNPB/II/2013 antara Kementerian
   PU dan BNPB tentang Penanggulangan Bencana Bidang PU.
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai
- Surat Edaran Menteri Nomor 10 Tahun 2017 tentang SOP Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak.

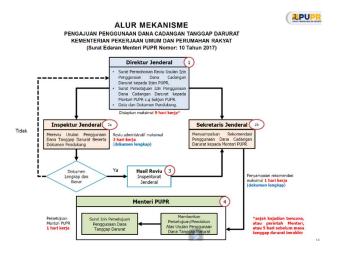
## **B. PENGANGGARAN PENANGANAN BENCANA**

#### a. Dukungan Kementerian PUPR (kegiatan)

- 1. Pra Bencana
  - Pembangunan akses road ke tempat evakuasi sementara.
  - Pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- 2. Pada saat Bencana
  - Memperbaiki aksesibilitas pada daerah bencana.
  - Menfungsikan kembali prasarana dan sarana dasar PUPR secara darurat.
  - Membuatkan aksesibilitas terhadap air bersih, sanitasi,dll untuk tempat pengungsian.
  - Inventarisasi bangunan-bangunan yang rusak.
- 3. Pasca Bencana
  - Pembangunan kembali prasarana dan sarana PUPR sesuai dengan standar sebelumnya atau bahkan lebih baik.

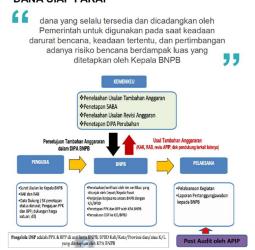
### b. Alur Mekanisme

PENGAJUAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN TANGGAP DARURAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Surat Edaran Menteri PUPR Nomor: 10 Tahun 2017).

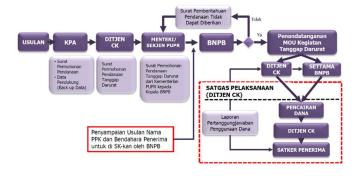


c. ALTERNATIF PENDANAAN: DANA SIAP PAKAI (DSP) BNPB (Peraturan BNPB Nomor 4
Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai)

# DANA SIAP PAKAI



d. MEKANISME USULAN PENANGANAN BENCANA MELALUI DANA SIAP PAKAI (DSP) BNPB (CONTOH KASUS DALAM PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI PROV. NTB)



C. DOKUMENTASI PENANGANAN BENCANA

